

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahan tidak serta-merta meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. *Good Governance* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti bahwa dengan diterapkannya Prinsip-Prinsip *Good Governance* maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel atas kriteria tertentu, sehingga hanya terdapat lima SKPD yang masuk ke dalam kriteria sampel penelitian.

2. Kriteria demografi responden yaitu terkait masa kerja responden kurang spesifik, karena tidak menjelaskan masa kerja pada bidang tertentu dan selama masa kerja pernah tidaknya dilakukan rotasi jabatan.
3. Instrumen pertanyaan dalam penelitian ini bias karena hanya memuat *positive statement*.

5.3 Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memiliki beberapa saranyaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan referensi yang lebih banyak lagi dan lebih memperluas objek/sampel penelitian. Selain itu juga disarankan untuk menambah variabel lain di luar variabel yang telah diteliti seperti kualitas sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan, sistem pengendalian intern, prinsip pengelolaan keuangan daerah, dan sebagainya. Selain itu, sebaiknya peneliti selanjutnya menggunakan item pertanyaan yang memuat pernyataan positif dan negatif, untuk mencegah instrumen bias.
2. Untuk pemerintah daerah sebaiknya perlu secara serius menyusun perencanaan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan. Termasuk didalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) oleh sumber daya manusia yang terkait dengan akuntansi pemerintahan. Selain itu, sebaiknya pemerintah daerah menerapkan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan dalam

penyajian informasi keuangan maupun kebijaksanaan memberikan perlakuan yang setara/wajar terhadap pihak-pihak berkepentingan sehingga pengelolaan pemerintahan semakin baik.

3. Untuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, tidak kalah pentingnya untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi pemerintahan.

5.4 Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis. Hasil temuan teoritis pada penelitian ini dapat menambah bukti empiris terkait adanya pengaruh positif tidak signifikan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini tidak mendukung teori menurut Nordiawan (2006:25), yaitu jika SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya, maka penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.

Jika dilihat dari kriteria penilaian BPK RI terhadap opini atas laporan keuangan, selain penerapan SAP kualitas laporan keuangan juga dinilai dari sistem pengendalian internal dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi, terdapat kemungkinan bahwa penerapan SAP tidak serta-merta meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah apabila kedua faktor lainnya tersebut lebih dominan mempengaruhi.

Selain itu, hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh yang signifikan antara *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mendukung pernyataan menurut Djokosantoso (2006:30) yang menyatakan bahwa hubungan antara penerapan *good governance* dan berkurangnya kecurangan pada pelaporan keuangan membuktikan meningkatnya kualitas laporan keuangan karena penerapan prinsip secara konsisten. Dalam penelitian ini prinsip *good governance* adalah transparansi, kewajaran, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Jadi, dengan diterapkannya keempat prinsip tersebut maka akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan karena sumber daya manusia, yaitu masih ada beberapa kelemahan seperti dalam pencatatan/penyusunan laporan keuangan ataupun ketidaksesuaian perhitungan nilai aset, penyusutan, cadangan penyisihan piutang, dan akun lainnya di BPKAD dengan dinas-dinas, maka sumber daya manusia dinilai belum memahami SAP secara keseluruhan dengan baik.

Adapun pada penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yakni dengan menciptakan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.